

# Obligasi daerah dijual 2011

## Pemprov DKI kejar opini wajar tanpa pengecualian

OLEH TH. D. WULANDARI  
Bisnis Indonesia

**JAKARTA:** Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memundurkan jadwal penerbitan obligasi daerah (*municipal bond*) dari tahun ini menjadi pada tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan penundaan itu bertujuan menunggu situasi pasar yang lebih kondusif supaya harga jual obligasi mencapai nilai tertinggi.

"Orang kalau mau jual obligasi harus lihat pasar, lihat suasana. Ada estimasi [nilai obligasinya] tetapi saya tidak akan ungkap sekarang," ujarnya akhir pekan lalu.

Saat ini, menurut dia, penerbitan obligasi daerah masih dikaji oleh International Financial Corporation (IFC), anak usaha Bank Dunia, guna memastikan waktu yang tepat penerbitan obligasi itu.

Gubernur menjelaskan penjualan obligasi daerah itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik di Ibu Kota.

Sejumlah program yang akan di biayai dengan obligasi antara lain pembangunan rumah susun, jalan tol dalam kota, pendirian sekolah, terminal bus, pengelolaan air limbah menjadi air bersih, dan pembiayaan mass rapid transit (MRT).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Sukri Bey menambahkan pihaknya menargetkan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta pada 2010 wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, lanjut dia, akan memuluskan rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi daerah mu-

### Sedikitnya enam kegiatan infrastruktur didanai dari penerbitan obligasi daerah

- Pembangunan rumah susun
- Tol dalam kota
- Pendirian sekolah
- Terminal bus
- Pengelolaan air limbah menjadi air bersih
- Pembiayaan MRT

Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2010  
Keterangan: Keenam kegiatan itu umumnya merupakan program unggulan yang memerlukan biaya tinggi.

BISNIS/ADI PURDIYANTO

lai tahun depan.

#### Tunggu waktu

Sampai dengan saat ini, Sukri menuturkan rencana penerbitan obligasi daerah sudah matang tinggal menunggu waktu yang tepat sebelum obligasi dilempar ke pasar.

"Terutama jika LKPD 2010 mendapat penilaian WTP karena sejak 2008 hingga 2009 BPK memberi penilaian wajar dengan pengecualian [WDP]," ungkap Sukri.

Dia menegaskan Gubernur Fauzi Bowo menginginkan penilaian BPK WTP kendati ketentuan perundang-undangan penerbitan obligasi daerah bisa dilakukan setelah dua kali mendapat penilaian WDP.

Penerbitan obligasi daerah mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sekaligus Peraturan Menteri Keuangan No. 147/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Dalam ketentuan itu menyebutkan salah satu syarat pemda menerbitkan obligasi daerah jika BPK memberi penilaian atas LKPD tahun anggaran minimal mendapat penilaian WDP 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, penerbitan obligasi daerah tidak boleh lebih dari 75% dari penerimaan daerah, dan rasio pengembalian pinjaman tak boleh me-

lebih 2,5%.

Syarat lain, obligasi diterbitkan untuk proyek yang menguntungkan dan berdampak pada ekonomi masyarakat luas, bukan untuk menutup defisit dengan jaminannya berupa barang pada proyek.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta diminta memanfaatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp10,4 triliun untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana busway.

Djan Farid, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DKI Jakarta, menyatakan busway merupakan solusi jangka pendek untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Dia menuturkan Ibu Kota membutuhkan langkah cepat untuk menuntaskan persoalan kemacetan pada saat ini.

Penuntasan semua koridor busway bisa menggunakan langkah darurat karena angkutan massal berbasis bus itu merupakan solusi jangka pendek.

Dia mengusulkan Pemprov DKI berinisiatif mengalihkan Silpa senilai Rp3,7 triliun dan penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp6,7 triliun untuk mendanai proyek itu. "Namun, koordinasikan terlebih dulu dengan pihak terkait di tingkat pusat agar tidak terjadi salah pengertian." (IRSAD SATI) (wulandari@bisnis.co.id)